

**BEDAH PLASTIK DAN ESTETIKA: TINJAUAN OTONOMI
PEREMPUAN ATAS TUBUHNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

HANATHALIA LIMAS

NIM: 22.C1.00

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2026

**BEDAH PLASTIK DAN ESTETIKA: TINJAUAN OTONOMI
PEREMPUAN ATAS TUBUHNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG KESEHATAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

HANATHALIA LIMAS

NIM: 22.C1.0042

Disetujui oleh:

P. Donny Danardono, S.H., Mag. Hum.

NPP: 05811990070

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketegangan antara otonomi tubuh perempuan dan objektifikasi patriarki dalam praktik bedah plastik dan tindakan estetika di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis sejauh mana regulasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan keputusan atas tubuhnya secara otonom. Dalam praktiknya, keputusan perempuan untuk melakukan tindakan estetika seringkali tidak sepenuhnya berdiri sebagai pilihan individual yang bebas, melainkan terbentuk oleh tekanan sosial, standar kecantikan patriarkal, serta budaya media yang menilai tubuh perempuan sebagai objek visual.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kepustakaan (*literature review*). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, serta diperkuat oleh wawancara dengan informan, yaitu perempuan yang menjalani tindakan estetika serta tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Kesehatan dan PP pelaksanaannya lebih dominan mengatur aspek administratif, perizinan, serta keselamatan tindakan medis, namun belum secara memadai mengatur dampak sosial-budaya seperti iklan klinik estetika, internalisasi standar kecantikan patriarkal, serta proses objektifikasi tubuh perempuan.

Dengan menggunakan perspektif Carol Smart, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan dapat berperan dalam menstabilkan praktik sosial yang telah patriarkal. Perempuan secara formal memiliki kebebasan untuk memilih tindakan estetika, tetapi kebebasan tersebut sering berada dalam posisi ambigu karena dibentuk oleh relasi kuasa, tekanan sosial, serta tuntutan femininitas ideal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih responsif gender agar praktik estetika tidak hanya dilihat sebagai layanan kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan martabat dan otonomi perempuan.

Kata Kunci: otonomi tubuh perempuan, bedah plastik estetika, patriarki, objektifikasi, hukum kesehatan.

ABSTRACT

This study examines the tension between women's bodily autonomy and patriarchal objectification in the practice of plastic surgery and aesthetic procedures in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the extent to which Law Number 17 of 2023 on Health and Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementation of Law Number 17 of 2023 provide legal space for women to make autonomous decisions over their bodies. In practice, women's decisions to undergo aesthetic procedures are often not purely individual choices, but are influenced by social pressure, patriarchal beauty standards, and media culture that constantly positions the female body as a visual object.

This research employs a normative juridical method using a statutory approach and literature review. The analysis is conducted through a descriptive-analytical method by examining primary and secondary legal materials, supported by interviews with informants, including women who have undergone aesthetic procedures, as well as medical professionals. The findings show that the Health Law and its implementing regulation primarily emphasize administrative aspects such as licensing and medical safety standards, while failing to adequately address socio-cultural impacts such as aesthetic clinic advertising, the internalization of patriarchal beauty norms, and the objectification of women's bodies.

Using Carol Smart's perspective, this study concludes that law is not entirely neutral, but may contribute to stabilizing patriarchal social practices. Although women formally possess the freedom to choose aesthetic procedures, such freedom remains ambiguous because it is shaped by power relations, social expectations, and demands for ideal femininity. Therefore, a stronger gender-responsive regulatory framework is needed so that aesthetic practices are not viewed merely as healthcare services, but also as social issues related to women's dignity and bodily autonomy.

Keywords: *women's bodily autonomy, aesthetic plastic surgery, patriarchy, objectification, health law.*